

PERAN JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) PASCA BENCANA ALAM 2018 DI SULAWESI TENGAH

Sulfitri Husain

Email: sulfitrih@gmail.com

Abstract.

The locus in this study is the disaster-affected area in middle Sulawesi. Palu, Sigi, and Donggala were some of the areas that were badly damaged as a result of the earthquake, tsunami and liquefaction that occurred in September 2018. In addition to the loss of life, the disaster caused several public facilities to be seriously damaged (broken electricity and telecommunications networks). School buildings, hotels, hospitals, offices, malls and several roads were badly damaged. Various national and international aids, both government and non-government, have contributed. The Japan International Cooperation Agency (JICA) is one of the international agencies involved from emergency response to recovery with a build back better concept in the Palu, Sigi, and Donggala (PASIGALA) areas. This study uses a descriptive qualitative method which will analyze the extent to which JICA's role as one of Japan's International Cooperation agencies is involved in providing post-disaster assistance. The Japan International Cooperation Agency (JICA) is one of the international agencies involved from emergency response to recovery with a build back better concept in the Palu, Sigi, and Donggala (PASIGALA) areas. In this study, in addition to primary data, secondary data in the form of books, documents, news, and journals are also

complementary to the analysis. Descriptive qualitative method is used in analyzing the extent to which JICA's role as one of Japan's International Cooperation agencies is involved in providing post-disaster assistance. The results of this study explain that JICA is one of the donor agencies that has a role and several programs in reorganizing middle Sulawesi after the disaster.

Keywords: *disaster relief, international agency, JICA*

Abstrak.

Lokus dalam penelitian ini adalah wilayah yang terdampak bencana di Sulawesi Tengah. Palu, Sigi, dan Donggala merupakan beberapa daerah yang rusak parah akibat dari gempa, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi pada September 2018 lalu. Selain korban jiwa, bencana tersebut menyebabkan beberapa fasilitas umum rusak parah (putusnya jaringan listrik dan telekomunikasi). Gedung sekolah, perhotelan, rumah sakit, perkantoran, mall dan beberapa jalan mengalami rusak parah. Berbagai bantuan nasional, internasional baik yang pemerintah dan non pemerintah berpartisipasi memberikan sumbangsihnya. Japan International Cooperation Agency (JICA) merupakan salah satu dari lembaga internasional yang terlibat mulai tanggap darurat hingga recovery dengan konsep build back better di wilayah Palu, Sigi, dan Donggala (PASIGALA). Dalam penelitian ini, selain data primer, data sekunder berupa buku, dokumen, berita, dan jurnal juga sebagai pelengkap analisis. Metode kualitatif deskriptif yang digunakan dalam menganalisis sejauh mana peran JICA sebagai salah satu badan Kerja Sama Internasional Jepang untuk terlibat dalam pemberian bantuan pasca bencana. Hasil penelitian ini menjelaskan

JICA merupakan sebagai salah satu lembaga pendonor yang memiliki peran dan beberapa program dalam menata kembali Sulawesi Tengah pasca bencana.

Kata kunci: *Bantuan kebencanaan, lembaga internasional, JICA*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara geografis, letak wilayah Indonesia berada di sekitaran *Ring of fire* atau cincin api yang merupakan salah satu istilah untuk Indonesia karena keberadaan wilayahnya yang rawan bencana. Tidak jarang, potensi kebencanaan yang sering terjadi di wilayah tersebut sangatlah beragam, diantaranya: letusan gunung berapi, banjir, kebakaran, tanah longsor, tsunami, abrasi, dan gempa bumi (Adiansyah dan Bedy Aga Fara Matrani 2021). Termasuk juga Sulawesi Tengah yang letaknya berada di atas patahan sesar Palu-Koro. Tidak hanya peristiwa bencana yang terjadi pada 2018 lalu, melainkan sebelumnya, hal serupa pernah terjadi. Pada tahun 1927, Palu pernah diguncang gempa yang juga memicu tsunami akibatnya daerah Biromaru dan sekitarnya mengalami kerusakan parah. Di tahun 1930 gempa kembali terjadi di Pantai Barat kabupaten Donggala yang juga menyebabkan tsunami. Peristiwa serupa selanjutnya terjadi pada 1938 di teluk Tambu. Tahun 1994 di Sausu, dan kemudian pada tahun 1996, 1998, 2005, 2008, 2012 gempa yang menyebarkan tsunami di wilayah Sulawesi Tengah khususnya Palu dan Donggala tersebut menyebabkan korban jiwa dan kerusakan (Rini 2018) (Ini Sejarah Gempa dan Tsunami di Sulteng 2018). Namun, peristiwa di tahun 2018 merupakan yang paling parah, sebab pada saat itu rangkaian bencana mulai dari gempa disusul dengan tsunami dan likuifaksi hampir terjadi secara bersamaan.

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada hari Jumat, 28 September 2018, jam 17.02.44 WIB pusat terjadinya gempa tektonik M 7.7 ini berada di Donggala dengan kedalaman 10 km, berLokasi pada titik 0.18 LS dan 119.85 BT dengan jarak 26 km dari Utara Donggala Sulawesi Tengah, (Gempa bumi Tektonik, BMKG, 2018). Berdasarkan data dari laporan akhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa korban jiwa baik yang meninggal ataupun hilang mencapai 4.340, yang mengalami luka-luka sebanyak 4.438 orang, dan 172.635 orang dievakuasi. Selain korban jiwa,

kerusakan bangunan permanen sebanyak 100.118 bangunan, sedangkan semi-permanen berjumlah 322 bangunan, dan fasilitas publik lainnya mencapai hingga 1.000 bangunan (Tim NMC CERC 2020). Tidak hanya Palu, Sigi, dan Donggala yang menjadi wilayah terdampak bencana. Wilayah yang ada di sekitarnya pun seperti Pasang Kayu, Mamuju, hingga menjangkau Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara juga merasakan getaran yang sesekali terjadi. Peristiwa ini cukup menjadi trauma terlebih bagi penduduk yang berlokasi di daerah bencana.

Pusat Gempa Bumi Tektonik Terjadi di Kabupaten Donggala.



Sumber: BMKG 29 September 2018

Bencana alam yang terjadi tersebut merusak hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat mulai dari ekonomi, sosial, hingga pendidikan. lebih dari 50.000 orang mengungsi hingga ke berbagai daerah di luar Sulawesi Tengah yang dianggap aman. Bencana yang merusak infrastruktur utama, ribuan fasilitas umum dan sosial termasuk sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah di Kota Palu dan beberapa Kabupaten disekitarnya. Berdasarkan hitung cepat yang dilakukan oleh BNPB dan *United Nations Development Programme*-UNDP, total kerusakan dan kerugian mencapai 18,48 triliun rupiah pada sektor infrastruktur dan fasilitas umum, permukiman, sosial, dan ekonomi (Proyek Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah (P169403), 2019). Dari angka dan kerugian yang ditimbulkan pasca bencana alam ini, tentunya pemerintah Sulawesi Tengah tidak dapat menanggung dan melakukan pembenahan secara mandiri mengingat ada beberapa lokasi yang menjadi perhatian khusus yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala (PASIGALA),

Peristiwa bencana ini menimbulkan perhatian besar dari Negara-negara di dunia sehingga banyak bantuan, baik yang datang dari dalam juga dari luar negeri. Sebutlah *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR), Palang Merah Australia (ARC), *United Nations Children's Fund* (UNICEF), *United*

Nation Development Programme (UNDP), dan *Japan International Cooperation Agency (JICA)* merupakan badan kerjasam internasional yang ikut serta dalam memberikan bantuannya. Sebagai langkah awal pada situasi tanggap darurat pasca terjadinya bencana, JICA bersama dengan dinas perindustrian dan perdagangan melakukan pelatihan dalam membuat kerajinan anyaman yang bahannya dari daun silar. Pendampingan ini ditujukan bagi kaum perempuan yang ada di selter pengungsian di kawasan *Sport Center* Balaroa. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat memulihkan khususnya perekonomian bagi pengungsi (Arshandi 2019). Dibidang lain, adanya transfer teknologi dan proses mengatasi tsunami serta likuifaksi sebagai pengalaman yang sering terjadi di Jepang sebagai wujud dalam membantu mengatasi resiko bencana kedepannya. Kerjasama lain yang dilakukan pihak JICA bersama dengan pemerintah yang diwakili oleh kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas yakni telah melakukan kolaborasi yang sifatnya teknis untuk perencanaan pembangunan dengan berbasis pada risiko bencana (S.Utami 2019). Selain itu pemberian bantuan teknis hingga bantuan hiba juga diberikan dalam rangka memulihkan dan membangun kembali kawasan Sulawesi Tengah khususnya daerah-daerah yang rusak parah akibat terjangan Tsunami, likuifaksi, dan gempa bumi pada september 2018 lalu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif yang di gunakan untuk menganalisis sejauh mana peran JICA dalam memberikan bantuan mulai dari tanggap darurat hingga rekonstruksi Sulawesi Tengah pasca bencana 2018 lalu. Data primer dan data sekunder berupa buku, dokumen, situs online (berita), dan jurnal digunakan dalam melengkapi penelitian tersebut. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain: pengumpulan data, mengolah data, serta mengkaji hingga mencapai suatu kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur masuknya bantuan Internasional ke lokasi pasca bencana?
2. Bagaimanakah peran dan program *Japan International Cooperation Agency* (JICA) Pasca Bencana Alam 2018 di Sulawesi Tengah?

Pembahasan

Prosedur Masuknya Bantuan Internasional Ke Lokasi Pasca Bencana

Bencana merupakan suatu fenomena yang terjadi disebabkan oleh alam dan non alam. Oleh karena itu, manusia harus memahami pengertian, jenis dan penyebab terjadinya bencana yang terkadang muncul dalam kehidupan manusia. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (BNPB t.t.). Selanjutnya dalam pasal tersebut diuraikan beberapa macam terkait kebencanaan beserta penyebabnya, diantaranya adalah:

1. Bencana alam yang disebabkan oleh adanya peristiwa dari alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, tanah longsor, angin topan, dan kekeringan.
2. Bencana nonalam yang disebabkan bukan karena faktor alam melainkan sebaliknya (nonalam), terdiri dari kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, penyebaran penyakit (epidemi), serta wabah penyakit.
3. Bencana sosial, yang terjadi akibat perbuatan manusia itu sendiri melalui ancaman atau tindak kekerasan sehingga menimbulkan kecemasan dan ketakutan di tengah masyarakat.

Selain uraian terkait kebencanaan tersebut, Gustavo (1995) mendefenisikan bencana merupakan hal yang harus diterima oleh manusia yang menjadikannya mengalami penderitaan ataupun kehilangan, yang pada intinya bahwa manusia akan mendapatkan kerugian ataupun resiko. Defenisi lain bencana adalah hal yang akan

menimbulkan resiko yang memiliki efek negatif terhadap manusia (Setyowati 2019).

Dari defenisi diatas serta berbagai resiko yang ditimbulkan dari bencana, akan menimbulkan empati dan simpati baik secara perorangan ataupun yang sifatnya lembaga. Oleh karena itu, pemberian bantuan juga akan berdatangan ke daerah atau lokasi terjadinya bencana tersebut. Adapun bantuan kebencanaan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Pada umumnya, bantuan darurat bencana merupakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada keadaan tanggap darurat bencana. Bantuan ini berupa bantuan sandang, pangan ataupun *non-pangan*, hunian sementara (huntara), layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi Berdasarkan (Bantuan Darurat Bencana 2021). Dalam situasi ini, pihak pemberi bantuan terdiri dari lokal, nasional, hingga internasional baik dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah pihak yang bertanggung jawab atas pendistribusian berbagai bantuan yang ada. Sementara bantuan internasional berasal dari negara lain, ataupun yang sifatnya lembaga pemerintah serta lembaga *non* pemerintah yang akan menyalurkan bantuannya terlebih dahulu menyampaikan laporan kepada kedutaan dan selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri.

Bantuan Lembaga internasional yang dimaksud disini adalah organisasi yang keberadaannya dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ataupun sebagai perwakilan dari PBB atau organisasi internasional (Kepala dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2010). Selanjutnya, bantuan asing ataupun dari lembaga internasional dapat diterima setelah melihat berbagai pertimbangan termasuk situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan suatu daerah/wilayah yang terdampak untuk mengatasinya sendiri melainkan membutuhkan pihak lain.

Masyarakat terdampak bencana yang membutuhkan bantuan baik materi maupun non materi harus segera mendapatkan bantuan. Disisi lain, dari pihak pemerintah yang juga terdampak bencana sering mengalami keterbatasan sehingga membutuhkan bantuan dari berbagai pihak (Helsloot, I dan A. Ruitenberg 2004).

Adapun yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana di Indonesia adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di tingkat nasional, yang menjadi penanggung jawab kebencanaan adalah BNPB yang dibantu oleh beberapa lembaga atau kementerian terkait. Lembaga tersebut terdiri dari: badan meteorologi, klimatologi dan geofisika (BMKG), badan pencarian dan pertolongan (basarnas), pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi (PVMBG), Polri, TNI, kementerian dalam negeri, kementerian kesehatan, kementerian sosial, dan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (BNPB 2017).

Berdasarkan aturan dari badan nasional penanggulangan bencana, penerimaan bantuan untuk kemanusiaan yang terdiri dari lembaga-lembaga internasional serta lembaga asing lainnya bukan pemerintah dapat diterima asalkan berdasarkan 2 (dua) pertimbangan antara lain (Peraturan Kepala BNPB 2010):

1. Dampak dari bencana yang terjadi melampaui kemampuan pemerintah untuk mengatasinya sehingga hal ini dirasa perlu untuk menerima bantuan yang datang dari lembaga-lembaga internasional maupun lembaga asing bukan pemerintah;
2. Adanya pernyataan pemerintah dalam hal menerima tawaran bantuan dari ke dua lembaga tersebut (internasional/lembaga asing bukan pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan di daerah terdampak bencana.

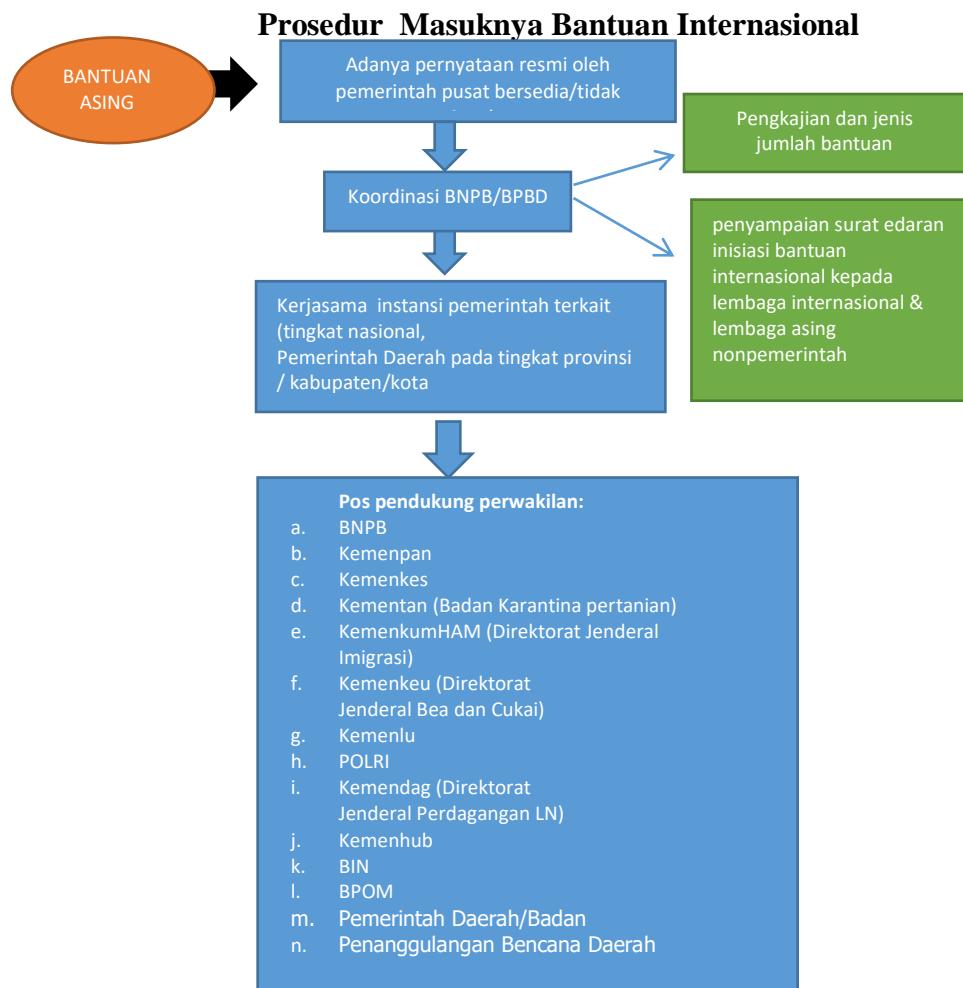
Beberapa hari peristiwa bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah, bantuanpun berdatangan mulai dari tingkat nasional hingga internasional. Beberapa Negara dan organisasi internasional yang memberikan bantuan antara lain Australia, Amerika Serikat, Maroko, Korea Selatan, Uni Eropa, Tiongkok, Singapura, Turki, Filipina, dan Swiss (Farisa 2018). Sementara lembaga internasional yang terlibat langsung dalam pemberian bantuan diantaranya UNICEF, UNDP, Palang Merah Australia (ARC), UNHCR, JICA, dan masih ada beberapa lembaga lainnya. Melalui BNPB dan pemerintah setempat yang memiliki

peran besar dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, bertanggung jawab dalam mekanisme dan proses masuknya berbagai bantuan tersebut.

Adapun prosedur atau mekanisme masuknya bantuan internasional ataupun lembaga asing lainnya kepada daerah yang terdampak bencana haruslah melalui proses sebagai berikut (BNPB 2010):

- a. Masuknya bantuan internasional diawali dengan pernyataan resmi pemerintah untuk bersedia menerima bantuan internasional.
- b. Jenis dan jumlah bantuan internasional didasarkan pada hasil pengkajian cepat yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD.
- c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyampaikan surat edaran inisiasi bantuan internasional kepada lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah, dengan menggunakan Formulir 1 dan Formulir 2 yang berisikan:
 - 1) Laporan singkat tentang bencana;
 - 2) Lamanya periode tanggap darurat;
 - 3) Informasi kebutuhan logistik dan peralatan yang mendesak (dari laporan
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Tim Kaji Cepat);
- 4) Informasi kebutuhan tenaga ahli yang dibutuhkan.
- d. Dalam memfasilitasi masuknya bantuan internasional maka BNPB bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait untuk tingkat nasional, Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota untuk:
 - 1) Menetapkan pangkalan militer, bandara dan pelabuhan yang menjadi pintu masuk bantuan internasional (entry point).
 - 2) Membentuk Pos Pendukung di tiap pangkalan militer, bandara dan pelabuhan yang ditetapkan menjadi pintu masuk bantuan internasional yang terdiri dari personil yang menangani Pos Pendukung ini terdiri dari beberapa perwakilan.

Secara ringkas alur dari prosedur tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: pedoman peran serta lembaga internasional/lembaga asing bukan pemerintah pada tanggap darurat, olah data penulis 2020

Dalam proses menerima dan memberi bantuan kepada wilayah terdampak bencana oleh pihak asing bukanlah hal mudah, pemberi bantuan harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh BNPB. Selain itu, Negara atau lembaga donor juga harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat dan mengandeng mitra lokal dan nasional dalam proses penyaluran bantuan tersebut. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa pemberi bantuan asing tidak mengetahui persis lokasi wilayah yang terdampak bencana. Setelah mendapatkan izin, jenis bantuan yang diprioritaskan pada tanggap darurat juga menjadi pertimbangan untuk menerima bantuan tersebut. Tenda pengungsian, *water treatment*, genset, makanan, bantuan medis baik berupa (perawat dan dokter, obat-obatan, dan kebutuhan medis lainnya)

dan angkutan udara untuk menjangkau wilayah yang tidak dapat diakses dengan menggunakan transportasi darat merupakan hal yang sangat dibutuhkan waktu itu.

Selain pemetaan kebutuhan tanggap darurat tentu juga terdapat kebutuhan transisi tanggap darurat berupa peralatan berat dan relawan untuk mengevakuasi korban yang tertimbun longsor dan puing-puing bangunan. Disamping itu, pemerintah Sulawesi Tengah membutuhkan beberapa ahli berpengalaman dibidangnya dalam menata dan membangun wilayah ini menjadi lebih baik.

Peran dan program *Japan International Cooperation Agency (JICA) Pasca Bencana Alam 2018 di Sulawesi Tengah*

Japan International Cooperation Agency (JICA) didirikan pada Agustus 1974 dan di bulan October 2003 badan kerjasama internasional Jepang berubah status dari lembaga publik khusus menjadi lembaga administratif independen. Lembaga ini merupakan salah satu badan donor bilateral yang terbesar di dunia yang didirikan oleh pemerintah Jepang guna membantu pembangunan khususnya negara-negara berkembang. JICA posisinya berada di bawah kekuasan Departemen Luar Negeri Jepang yang juga memberikan bantuan baik berupa materi dan nonmateri, termasuk pinjaman hibah dan bentuk-bentuk kerjasama teknik dalam berbagai bidang kepada negara yang membutuhkan bantuan (JICA Profile t.t.).

Adapun visi dan misi JICA (JICA's Vision t.t.), antara lain:

Vision: Leading the world with trust

JICA, with its partners, will take the lead in forging bonds of trust across the world, aspiring for a free, peaceful and prosperous world where people can hope for a better future and explore their diverse potentials. (JICA, bersama mitranya, akan memimpin dalam membentuk ikatan kepercayaan di seluruh dunia, bercita-cita untuk dunia yang bebas, damai dan makmur di mana orang dapat berharap untuk masa depan yang lebih baik dan mengeksplorasi potensi mereka yang beragam).

Mission

JICA, in accordance with the Development Cooperation Charter, will work on human security and quality growth (JICA, sesuai dengan Piagam Kerja Sama Pembangunan, akan bekerja pada keamanan manusia dan pertumbuhan kualitas).

Melalui visi dan misi ini JICA terus memberikan bantuan bagi Negara-negara yang membutuhkan, khususnya bagi Negara-negara berkembang dan daerah yang terdampak bencana.

JICA Pada Tanggap Darurat Hingga Rekonstruksi Bencana Palu, Sigi, dan Donggala

Empat tahun peristiwa bencana alam, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi melanda Kota Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) di provinsi Sulawesi Tengah tepatnya pada tanggal 28 September 2018. Bencana yang memporak-porandakan pemukiman warga dan merusak segala fasilitas umum tentu masih menjadi ingatan yang tidak mudah dilupakan oleh sebagian besar penduduknya. Tidak hanya merusak, Gempa yang berkekuatan 7,4 SR merenggut banyak korban jiwa dan menjadi perhatian seluruh dunia. Bantuanpun berdatangan baik dari dalam dan luar negeri. Hal ini tentunya disambut baik oleh pemerintah Indonesia Khususnya bagi pemerintah yang terdampak bencana, sebab penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Tengah saja namun juga membutuhkan aktor-aktor lain dalam membantu membangun daerah ini kembali. Keterlibatan berbagai aktor sangat dibutuhkan dalam penyaluran bantuan kemanusian. Tujuannya agar dapat menjangkau sehingga pendistribusian barang dapat terlaksana dengan baik, cepat, tepat waktu, tepat sasaran. Selain itu, berbagai keterbatasan alat, pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia dan finansial menjadi pertimbangan untuk melibatkan pihak lain.

Kerusakan serta kerugian yang dialami Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di 4 (empat) Kabupaten/Kota terdampak paling parah yakni Kota Palu, Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong mencapai Rp 18,48 triliun. Data ini diperoleh dari perhitungan BNPB hingga tanggal 26 Oktober 2018 lalu, Kerugian dan kerusakan terbesar berasal dari permukiman yang diikuti oleh

sektor ekonomi (Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019, 2019). Melihat kondisi ini, JICA yang merupakan salah satu lembaga pemberi bantuan asal Jepang terlibat langsung dalam upaya mengembalikan kondisi menjadi lebih baik. Hal ini dilakukan selain memberi bantuan dana hiba, juga mengirimkan tenaga-tenaga ahli, melakukan transfer teknologi, dan pengalaman atas kejadian gempa dan tsunami yang juga sering melanda Negara tersebut.

Beberapa hari setelah gempa, tsunami, dan likuifaksi, melalui JICA team relawan tanggap darurat dari Jepang tiba di Palu untuk menelaah kondisi yang ada dilapangan khususnya di area yang berdampak bencana. Tim tersebut juga membawa beberapa barang bawaan yang sangat diperlukan termasuk tenda pengungsian dan beberapa keperluan lain yang dibutuhkan masyarakat setempat. Selanjutnya, JICA dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Induk (*Master Plan*) untuk membangun kembali Sulawesi Tengah paska terjadinya bencana. Selanjutnya kerjasama teknis dibentuk sebagai respon terhadap rencana program pembangunan tersebut. Yamanaka Shinichi perwakilan dari JICA juga melakukan penandatanganan bersama Sugiyartanto sebagai Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penandatanganan tersebut merupakan persetujuan hibah sebesar 2,5 Milyar Yen untuk membangun kembali Jembatan Palu IV yang hancur pasca bencana lalu. (JICA 2019).

Selain bantuan hibah tersebut, pada 19 April 2022, JICA bersama Pemerintah Indonesia menandatangi dokumen Perjanjian Kerjasama (*Minutes of Meeting/MM*) sebagai program kerjasama oleh JICA. "Perumusan Komunitas Rekonstruksi Tangguh di Kelompok Daerah Relokasi di Kota Palu" merupakan konsep JICA *Partnership Project* yang akan dilaksanakan JOCA (*Japan Overseas Cooperative Association*) yang diawasi langsung oleh JICA dan BAPPENAS (JICA 2022). Sebagai lembaga internasional yang telah berpengalaman, JICA juga melakukan pendampingan kepada pemerintah untuk mengembangkan rencana induk rekonstruksi dasar. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa program yang terdiri dari draf rencana tata ruang, penilaian risiko bencana, program restorasi penghidupan/pemulihan komunitas, dan pengembangan rencana konstruksi

infrastruktur. Adapun target utamanya adalah warga yang rumahnya telah direlokasi oleh pemerintah.

Bantuan JICA Hingga Rencana Pembangunan Jembatan Icon Palu



Sumber: olah data penulis, 2022

Alur Proses Rencana Induk Pemulihan dan Relokasi



Sumber: Rencana Induk Pemulihan Dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah, Bappenas, 2018

Selain bantuan dana hibah, beberapa program yang telah dipersiapkan oleh JICA dan pemertintah Sulawesi Tengah dalam merehabilitasi provinsi tersebut dengan konsep “*build back better* (membangun kembali dengan lebih baik).” program yang diharapkan tersebut antara lain: 1). Bekerjasama dalam membuat peta lokasi rawan bencana, 2). menyusunan rencana tata ruang kota khususnya daerah Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong dengan mempertimbangkan peta zona wilayah rawan bencana, 3). Meyusun konsep infrastruktur termasuk jalan, dinding atau tanggul pengaman pantai, serta jembatan, dan 4). *livelihood activity* atau dengan kata lain pemulihan aktivitas masyarakat (S.Utami 2019).

Rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Sulawesi Tengah juga telah dimulai sejak 2019 dan akan berakhir pada 2023 dengan melibatkan ahli yang terlebih dahulu melakukan survey ke wilayah pasca bencana.

Penutup

Sudah empat tahun sejak peristiwa gempa bumi, likuifaksi (tanah bergerak), dan tsunami yang terjadi pada 2018 di wilayah Sulawesi Tengah, pemerintah perlahan membenahi wilayahnya yang tentunya tidak dapat bergerak tanpa dukungan dan bantuan dari pihak luar termasuk lembaga-lembaga internasional. Pasca bencana, berbagai bantuan kemanusiaan baik yang sifatnya perorangan, kelompok, bantuan pemerintah dan non pemerintah, dan negara luar masuk ke Indonesia, termasuk JICA. Kehadiran lembaga asal Jepang dalam memberikan bantuan baik berupa materi dan nonmateri, transfer teknologi dan *sharing* pengalaman melalui edukasi kebencanaan dirasa perlu mengingat masyarakat khususnya Sulawesi Tengah masih kurang pengetahuan terkait kebencanaan serta sumber daya yang masih terbatas.

Peran dan program JICA begitu besar dan sangat membantu pemerintah Sulawesi Tengah dalam menyalurkan bantuan. Melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah sehingga beberapa program yang dimiliki dapat tersalurkan termasuk bantuan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang hingga kini masih berjalan. JICA juga bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Induk (*Master Plan*) dengan beberapa fokus yang menjadi targe JICA, diantaranya pemulihan kembali untuk kehidupan dan menguatkan masyarakat pasca bencana, memperbaiki fasilitas umum yang telah hancur agar dapat bertahan dari bencana, dan menyusun rencana tata ruang yang berdasarkan pada risiko bencana. Dengan adanya konsep “*build back better*” atau membangun kembali dengan lebih baik. Sebagai lembaga pemberi bantuan asal Jepang yang juga sebagai Negara dengan tingkat resiko bencana cukup tinggi, sudah memiliki banyak pengalaman sehingga dalam proses pemberian bantuan juga melakukan transfer ilmu dalam hal bagaimana melakukan penanganan dan mitigasi bencana. Tujuannya agar dapat mencegah dan

mengurangi resiko yang akan terjadi akibat bencana.

Referensi

- Adiansyah, Joni Safaat, dan Bedy Aga Fara Matrani. 2021. “Belajar dari KKN Kebencanaan: Pola Distribusian Bantuan Paska Gempa Lombok antara MDMC dan BPBD.” *Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(3). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Axiologiya/article/download/4247/4136>.
- Arshandi, Muhammad. 2019. “JICA siap bantu pemulihan ekonomi pascabencana di Palu.” *antaranews*. <https://sulteng.antaranews.com/berita/61316/jica-siap-bantu-pemulihan-ekonomi-pascabencana-di-palu>.
- “Bantuan Darurat Bencana.” 2021. *Ensiklopedia Penanggulangan Bencana Indonesia*.
- BNPB. 2017. *Tanggap Tangguh Menghadapi Bencana*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- . “Potensi dan Ancaman Bencana.” <https://bnpb.go.id/potensi-bencana>.
- Farisa, Fitria Chusna. 2018. “10 Negara Dunia Tawarkan Bantuan untuk Korban Gempa dan Tsunami Palu.” <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/01/16380181/10-negara-dunia-tawarkan-bantuan-untuk-korban-gempa-dan-tsunami-palu>.
- Helsloot, I., dan A. Ruitenberg. 2004. “Citizen Response to Disasters: A Survey of Literature and Some Practical Implications.” *Journal of Contingencies and Crisis Management* 12(3). <http://crisislab.nl/zelfredzaamheid/wp-content/uploads/Helsloot-I.-Ruitenberg-A.-2004-Citizen-Response-to-Disasters-a-Survey-of-Literature-and-Some-Practical-Implications.-Journal-of-Contingencies-and-Crisis-Management.pdf>.
- “Ini Sejarah Gempa dan Tsunami di Sulteng.” 2018. *Media Indonesia*. Sumber: <https://mediaindonesia.com/nusantara/187353/ini-sejarah-gempa-dan-tsunami-di-sulteng>.
- JICA. 2019. “Penandatanganan Kesepakatan Bantuan Hibah – Pembangunan Jembatan Palu Sebagai Kontribusi Untuk Membangun Kembali Kota Palu yang Tangguh Bencana.” Dalam *Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia*. https://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/others/c8h0vm000001pwe4-att/press190621_ina.pdf.
- . 2022. “Penandatanganan Minutes of Meeting untuk Program Kemitraan JICA di Indonesia Revitalisasi Palu Melalui Aktivitas Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas.” Dalam *Penandatanganan Minutes of Meeting untuk Program Kemitraan JICA di Indonesia Revitalisasi Palu Melalui Aktivitas Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas*, JICA.

<https://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/others/press220419.html>

- Kepala dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2010. “Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Pada Saat Tanggap Darurat.” <https://www.bnppb.go.id/uploads/24/peraturan-kepala/2010/perka-22-tahun-2010-tentang-pedoman-peran-serta-lembaga-internasional-dan-lembaga-asing-nonpemerintah-pada-saat-tanggap-darurat-bahasa-indonesia.pdf>.
- “Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.” 2010. https://bnppb.go.id/ecoop1a/view/produk_hukum/file/1.pdf.
- Rini, Rini Ayu Panca. 2018. “Data dan Fakta Gempa Disertai Tsunami yang Pernah Terjadi Sulawesi Artikel ini telah tayang di dengan judul Data dan Fakta Gempa Disertai Tsunami yang Pernah Terjadi Sulawesi.” Tribunnews.com. <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/29/data-dan-fakta-gempa-disertai-tsunami-yang-pernah-terjadi-sulawesi>.
- Setyowati, Dewi Liesnoor. 2019. pendidikan kebencanaan. Universitas Negeri Semarang. <https://lp3.unnes.ac.id/v2/wp-content/uploads/2019/03/Pendidikan-Kebencanaan-Suplemen-MKU-Pend.-Konservasi-.pdf>.
- S.Utami, Sinar Putri. 2019. “Indonesia kerjasama dengan JICA untuk bangun kembali Sulteng pascabencana.” <https://nasional.kontan.co.id/news/indonesia-kerjasama-dengan-jica-untuk-bangun-kembali-sulteng-pascabencana>.
- Tim NMC CERC. 2020. Laporan Bulan Agustus Tahun 2020 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulawesi Tengah. National Management Consultant-Contingency Emergency Response Component (NMC-CERC). https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/pdf/laporan%20agustus%202020_09.09.2020.pdf.